

BLUE EKONOMI: DAMPAK PERENCANAAN ANGGARAN TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN

Blue Economy: The Impact of Budget Planning on Sustainable Economic Development

Soraya Lestari¹, Zainal Abidin Suarja²

¹Universitas Ubudiyah Indonesia

²Universitas Bina Bangsa Get Sempena

Email Correspondensi: soraya.lestari@uui.ac.id¹⁾, zainal@bbg.ac.id²⁾

Abstract

Anggaran sebagai alat perencanaan berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi suatu daerah. Pembangunan ekonomi yang baik tergambar dalam perencanaan yang baik dan terarah, serta memiliki korelasi dengan tujuan pembangunan daerah. Ketercapaian pembangunan ekonomi berkelanjutan tentunya harus memenuhi aspek-aspek penting salah satunya adalah aspek lingkungan. Pentingnya aspek lingkungan mengharuskan pemerintah untuk dapat mengelola anggaran dengan bijak. Hal ini juga didukung dengan adanya pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) yang dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Adaptasi Perubahan Iklim (API) yang berfokus pada ekonomi biru dengan tujuan mengurangi emisi gas rumah kaca. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat apakah pemerintah daerah telah membuat rencana anggaran yang mendukung terlaksananya ekonomi biru. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Sabang telah melakukan penganggaran ke arah ekonomi biru namun masih perlu pemerataan ke semua instansi.

Keywords: Perencanaan Anggaran, Pembangunan Ekonomi, Blue Ekonomi

Abstrak

The budget as a planning tool plays an important role in supporting the economic development of a region. Good economic development is reflected in good and directed planning and correlates with regional development goals. The achievement of sustainable economic development must of course meet important aspects, one of which is the environmental aspect. The importance of environmental aspects requires the government to be able to manage the budget wisely. This is also supported by the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs) as outlined in the National Action Plan (RAN) and Climate Change Adaptation (API) which focus on the blue economy to reduce greenhouse gas emissions. The purpose of this research is to see whether the local government has made a budget plan that supports the implementation of the blue economy. The method used in this research is descriptive qualitative. The results of the study show that the regional government of Sabang City has budgeted toward a blue economy but still needs equity among all agencies.

Keywords: Budget Planning, Economic Development, Blue Economy

PENDAHULUAN

Anggaran berperan penting dalam menentukan kemajuan ekonomi suatu daerah di masa yang akan datang. Anggaran pula sebagai alat untuk pengambilan keputusan, sehingga anggaran mencerminkan kondisi ekonomi suatu negara. Penganggaran yang baik akan tercermin pada realisasi anggaran yang baik pula. Namun sayangnya, dalam penganggaran suatu anggaran tidak hanya dinilai dari output yang dihasilkan melainkan juga outcome yang akan berdampak terhadap perekonomian dalam jangka Panjang. Pembangunan berkelanjutan sektor kelautan dan perikanan melalui prinsip ekonomi biru merupakan tuntutan global. Pemerintah Indonesia perlu membuat terobosan program yang selaras dengan kelestarian lingkungan dan didukung dalam penganggaran setiap tahunnya. Ekonomi biru harus mendukung pembangunan ekonomi Indonesia dengan memanfaatkan potensi budidaya laut dengan tetap menjaga keseimbangan ekologi dan keanekaragaman hayati, penguatan produksi ekspor dan pengembangan desa budidaya akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan mata pencaharian masyarakat pesisir.

Sabang merupakan salah satu kota di Aceh yang merupakan daerah kepulauan dan menjadi zona ekonomi bebas di Indonesia. Besar potensi pengelolaan ekonomi biru di Kota Sabang yang dapat dikembangkan. Mulai dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dapat mengelola potensi ekonomi tersebut menjadi sumber pendapatan yang besar. Namun sayangnya, saat ini dukungan negara terhadap sektor kelautan dan perikanan masih rendah, tercermin dari alokasi anggaran yang relatif kecil dibandingkan potensinya dalam menghasilkan devisa. Perlu menerapkan praktik pengelolaan berkelanjutan yang dapat menjawab tantangan dan permasalahan di sektor tersebut. Konsep ekonomi biru mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan pelestarian lingkungan, inklusi sosial, dan penguatan ekosistem laut. Ekonomi biru mencakup berbagai sektor, termasuk perikanan, akuakultur, pariwisata, energi terbarukan, bioteknologi, perkapalan, dan transportasi laut. Ini menekankan pembangunan yang bertanggung jawab dan terintegrasi dari sektor-sektor ini, dengan mempertimbangkan pelestarian lingkungan, inklusivitas sosial, dan kemakmuran ekonomi.

Konsep ekonomi biru mengakui bahwa lautan dan pantai menawarkan peluang besar untuk kegiatan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Namun, juga mengakui perlunya mengatasi tantangan seperti penangkapan ikan berlebihan, pencemaran laut, perusakan habitat, dan dampak perubahan iklim. Dengan mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan dan pendekatan inovatif, negara-negara dapat membuka potensi ekonomi dari sumber daya laut mereka sambil menjaga keutuhan ekosistem laut. Ini melibatkan promosi praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan, mendukung pengembangan akuakultur yang bertanggung jawab, berinvestasi dalam proyek energi terbarukan seperti ladang angin lepas pantai, menerapkan strategi

pariwisata pesisir dan laut yang meminimalkan dampak negatif, dan mendorong kemajuan penelitian dan teknologi untuk konservasi laut dan pengelolaan sumber daya.

Pendekatan ekonomi biru mendorong kolaborasi antara pemerintah, bisnis, komunitas lokal, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan tata kelola yang efektif dan pembangunan sumber daya laut yang berkelanjutan dengan pendekatan anggaran yang tepat. Dalam proses penganggaran tentunya akan pertimbangan lingkungan, keadilan sosial, dan kelayakan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya. Dalam penganggaran, menerapkan strategi ekonomi biru membutuhkan pendekatan holistik dan terintegrasi, di mana pembangunan ekonomi diupayakan selaras dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan dan sejahtera bagi masyarakat dan bangsa pesisir dengan memanfaatkan potensi lautan secara bertanggung jawab dan inklusif. Perencanaan anggaran dapat berbeda tergantung pada konteks dan tujuan yang spesifik. Namun, secara umum, perencanaan anggaran merupakan alat yang penting untuk mengelola keuangan secara bijaksana, meningkatkan efisiensi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

KAJIAN LITERATUR

Rencana Anggaran

Perencanaan dan perubahan lingkungan memiliki keterkaitan yang erat. Perencanaan lingkungan melibatkan dukungan, penilaian, dan pengelolaan dampak lingkungan dari kegiatan pembangunan atau perubahan yang direncanakan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perubahan tersebut dilakukan secara berkelanjutan dan memperhatikan perlindungan lingkungan. Anggaran harus dipublikasikan atau diinformasikan kepada publik untuk di kritik, diuji dan diberi masukan (Sumenge, 2013). Individu yang menghadapi kondisi lingkungan yang tidak pasti, cenderung akan membuat realisasi anggaran (anggaran aktual) yang tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga akan memperkecil pencapaian sasaran yaitu ketepatan anggaran (Saputro, 2016). Pengelolaan anggaran yang tidak ideal akan mengganggu fungsi anggaran, salah satunya adalah target yang tidak tercapai. Perencanaan anggaran memiliki dampak yang signifikan dalam konteks ekonomi dan pengelolaan keuangan. Yang terpenting dalam perencanaan anggaran antara lain:

1. Pengendalian Pengeluaran: Perencanaan pengendalian membantu mengendalikan pengeluaran pemerintah atau perusahaan dengan menetapkan batasan yang jelas pada pengeluaran yang dapat dilakukan. Hal ini membantu mencegah pemborosan dan memastikan penggunaan dana secara efisien.
2. Prioritas dan alokasi sumber daya: Melalui perencanaan anggaran, sumber daya yang terbatas dapat dialokasikan dengan lebih baik sesuai dengan prioritas dan tujuan yang telah ditetapkan. Ini memungkinkan atau perusahaan pemerintah untuk fokus pada kegiatan yang paling penting dan memberikan manfaat terbesar.

3. Pengambilan keputusan yang terinformasi: Perencanaan pengendalian melibatkan pengumpulan dan analisis data keuangan yang mendalam. Hal ini membantu pengambilan keputusan yang lebih terinformasi tentang alokasi sumber daya, pengembangan kebijakan, dan penilaian kinerja keuangan. Keputusan yang didasarkan pada informasi yang akurat dan menyeluruh dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan.
4. Transparansi dan akuntabilitas: Perencanaan anggaran memungkinkan transparansi dalam penggunaan dana publik atau perusahaan keuangan. Hal ini memungkinkan pihak-pihak terkait, seperti masyarakat umum, pemegang saham, atau pemangku kepentingan lainnya, untuk memantau penggunaan dana dan memastikan akuntabilitas pemerintah atau perusahaan.
5. Pengelolaan risiko: Dalam perencanaan dana, risiko keuangan diidentifikasi dan dikelola. Strategi pengelolaan risiko seperti cadangan keuangan, asuransi, atau diversifikasi pendapatan dapat dimasukkan dalam perencanaan anggaran untuk menghadapi ketegangan atau situasi yang tidak terduga.
6. Pengembangan ekonomi: Perencanaan anggaran yang baik dapat mendukung pengembangan ekonomi dengan memberikan dukungan keuangan pada sektor-sektor yang strategis. Misalnya, melalui alokasi anggaran untuk infrastruktur, pendidikan, atau penelitian dan pengembangan, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Pemerintah harus berfokus pada perencanaan ekonomi secara berkelanjutan, hal ini karena kelangsungan ekonomi suatu negara tidak hanya tentang seberapa banyak kekayaan yang diperoleh tetapi tentang bagaimana pengelolaan kekayaan yang baik dan benar. Dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus memenuhi beberapa aspek penting, antara lain:

1. Aspek lingkungan Alam. Upaya pembangunan harus dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, menjaga keanekaragaman hayati, dan meminimalkan kerusakan lingkungan. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah dampak negatif jangka panjang terhadap lingkungan.
2. Aspek Sosial. Pembangunan harus dapat memberikan manfaat bagi seluruh anggota masyarakat, termasuk masyarakat yang berada di daerah terpencil atau kurang berkembang. Pemerataan sosial dan pengurangan kesenjangan ekonomi harus menjadi prioritas dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
3. Aspek ekonomi juga harus diperhatikan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pembangunan harus mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi kemiskinan. Dalam kaitan ini, penting untuk memperhatikan kesinambungan ekonomi jangka panjang dan membangun ekonomi yang kuat dan stabil.

4. Aspek partisipasi masyarakat juga merupakan aspek penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan, serta memastikan bahwa kepentingan semua pihak terwakili.

Dampak konsep blue Economy terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia (Banu, 2020) :

1. Konsep ini megedepankan peningkatan produksi kelautan
2. Produktifitas kelautan menjadi sektor utama dalam menyumbang pendapatan nasional.
3. Jumlah produksi perikanan sangat banyak dan dapat digunakan sebagai komoditas ekspor yang akan menghasilkan devisa.
4. Berkembangnya sektor kelautan dalam konsep blue Economy tidak hanya mempengaruhi sektor perikanan, namun sektor lain juga terdorong karena potensi kelautan Indonesia meliputi sumber daya hayati dan non hayati seperti minyak bumi dan bahan-bahan tambang yang lain yang dapat berkontribusi tinggi dalam pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi.
5. Blue Ekonomi dapat menjadi andalan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, karena bersifat ramah lingkungan dan mengedepankan keberlangsungan ekosistem.

Ekonomi Biru

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan mengatur bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengelolaan kelautan untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan dengan prinsip ekonomi biru (blue economy). Ekonomi biru merupakan model pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan pembangunan darat dan laut dengan memperhitungkan daya dukung sumber daya dan lingkungan. Pada prinsipnya potensi darat, laut, dan udara harus disinergikan sehingga menjadi kekuatan Indonesia. Penerapan model blue ekonomi yang dilakukan di Indonesia mengarah kepada industri perikanan. Blue Konomi dijadikan sebagai landasan pola pembagunan ekonomi kelautan yang berfokus kepada ocean-base economy (Wahyuddin dkk, 2022).

Konsep ekonomi biru mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan pelestarian lingkungan, inklusi sosial, dan penguatan ekosistem laut. Pemerintah daerah memiliki peran dan tanggung jawab khusus dalam pengelolaan lingkungan, khususnya wilayah pesisir dan laut. Tujuannya adalah untuk memperkuat ketahanan pesisir menuju ekonomi biru lokal yang berkelanjutan dan berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang pengelolaan pesisir terpadu. Sabang merupakan daerah kepulauan yang dikelilingi laut dan memiliki sumberdaya yang besar untuk pengembangan ekonomi biru. Arah kebijakan untuk pengelolaan anggaran Sabang dapat berfokus pada pengembangan ekonomi biru.

Perkembangan pesat dalam industri bisnis tentunya akan berpengaruh terhadap perubahan lingkungan dimana, eksploitasi sumber daya akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Sehingga perlu adanya kebijakan khusus dari pemerintah untuk mengontrol industri bisnis baik skala kecil maupun besar (Septiandika dkk, 2022). Berikut adalah beberapa cara di mana perencanaan dan perubahan lingkungan saling terkait:

1. **Evaluasi dampak lingkungan:** Perencanaan lingkungan melibatkan evaluasi dampak lingkungan yang mungkin terjadi akibat perubahan atau pembangunan. Hal ini meliputi bantuan potensi dampak negatif terhadap ekosistem, sumber daya alam, kualitas udara dan air, pengawetan hayati, serta masyarakat lokal. Hasil dari evaluasi ini membantu dalam pengambilan keputusan tentang bagaimana mengelola dampak-dampak tersebut dan mengurangi dampak negatif sebanyak mungkin.
2. **Penangkapan kawasan konservasi:** Dalam perencanaan lingkungan, kawasan-kawasan yang memiliki nilai ekologi tinggi dan penting untuk keberlanjutan lingkungan sering diidentifikasi sebagai kawasan konservasi. Area konservasi ini kemudian dijaga dan diatur secara khusus untuk melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem, dan fungsi ekologisnya.
3. **Integrasi praktik berkelanjutan:** Perencanaan lingkungan mencakup integrasi praktik-praktik berkelanjutan dalam perubahan atau pembangunan yang direncanakan. Praktiknya ini mencakup penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang efisien, pengurangan emisi gas rumah kaca, perlindungan keanekaragaman hayati, dan penggunaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Perencanaan lingkungan memastikan bahwa praktik-praktik ini dipertimbangkan dalam perubahan atau pembangunan yang direncanakan.
4. **keterlibatan publik:** Perencanaan lingkungan melibatkan keterlibatan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses pengambilan keputusan. Ini memungkinkan mereka berkontribusi pada perencanaan dan mendistribusikan masukan mereka terkait dengan dampak lingkungan dan kepentingan lokal. Partisipasi publik ini membantu menghasilkan keputusan yang lebih berkelanjutan dan mempertimbangkan perspektif yang beragam.
5. **Pantau dan evaluasi:** Perencanaan lingkungan melibatkan pemantauan dan evaluasi dampak lingkungan dari perubahan atau pembangunan yang telah dilakukan. Melalui pemantauan ini, dapat dilakukan penilaian terhadap efektivitas tindakan pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan dan melihat apakah perlu dilakukan penyesuaian atau perbaikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kota Sabang. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan penyampaian terperinci tentang orang, tempat, atau kejadian dalam satu ranah. Peneliti melakukan analisis data dari segala sumber seperti wawancara, observasi dan dokumen untuk memotret/memvisualisasikan suatu kejadian (Creswell, 2015). Penelitian deskriptif-kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan, dan

menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti. Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) (Sugiyono, 2016) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Irawan, 2019).

Penelitian ini dilakukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Sabang. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dokumen berupa Laporan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2017-2022. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RPJMD). Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat potensi besar untuk mengembangkan ekonomi biru di Kota Sabang, karena Kota Sabang merupakan daerah yang memiliki kekayaan akan sumber daya laut. Beberapa langkah yang diambil untuk mendorong perkembangan ekonomi biru di Kota Sabang antara lain:

1. Peningkatan sektor perikanan: Pemerintah daerah dan pihak terkait telah berupaya untuk meningkatkan produksi perikanan dengan menerapkan praktik budidaya yang berkelanjutan, pembenihan ikan, dan pengelolaan yang baik. Selain itu, pelatihan dan pendampingan juga diberikan kepada nelayan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam pengelolaan sumber daya laut.
2. Pariwisata Bahari : Sabang memiliki keindahan alam bahari yang menakjubkan, seperti pantai yang indah, terumbu karang, dan potensi selam yang menarik. Pemerintah daerah telah mempromosikan pariwisata bahari dengan meningkatkan aksesibilitas, memperbaiki infrastruktur pariwisata, dan melakukan kampanye pemasaran untuk menarik wisatawan. Ini memberikan dampak positif bagi perekonomian Aceh melalui pendapatan dari sektor pariwisata.
3. Energi terbarukan: Sabang memiliki potensi besar untuk menghasilkan energi terbarukan, terutama energi angin dan energi laut. Beberapa proyek pembangkit listrik tenaga angin telah diimplementasikan di Aceh untuk memanfaatkan potensi tersebut. Selain itu, penelitian dan pengembangan terus dilakukan untuk mengidentifikasi potensi energi laut, seperti pemanfaatan energi gelombang laut dan arus laut.
4. Inovasi teknologi maritim: Aceh juga berupaya mendorong inovasi dan pengembangan teknologi maritim. Ini meliputi pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk mempermudah koordinasi dan pengelolaan sumber daya laut, serta pengembangan teknologi pengolahan hasil laut yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Upaya ini bertujuan untuk mengembangkan ekonomi biru yang berkelanjutan di Sabang, yang tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga

keberlanjutan sumber daya laut dan ekosistem pesisir. Dalam perkembangan ekonomi biru, penting untuk memastikan adanya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya laut dan pelestarian lingkungan untuk kepentingan jangka panjang. Ekonomi biru mengacu pada penggunaan dan pengelolaan sumber daya laut dan kelautan yang berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Ini berfokus pada pemanfaatan potensi ekonomi lautan sambil memastikan kesehatan jangka panjang dan ketahanan ekosistem laut.

1. Decision Making (model aktor rasional). seorang aktor yang memiliki kekuatan untuk membuat kebijakan yang rasional dalam menyusun sebuah kebijakan yang akan digunakan aktor tersebut terbagi menjadi tiga yakni Model Aktor Rasional, Model Proses Organisasi, dan Model Politik Birokratik. Di Indonesia penerapan yang digunakan adalah model aktor, presiden Joko Widodo, yang menyusun kebijakan konsep blue ekonomi. Sejalan dengan prinsip-prinsip Blue Economy yakni kebijakan pada sektor kelautan dan perikanan yang seharusnya difokuskan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan secara imbang untuk melalui diversifikasikan kegiatan ekonomi sehingga mampu untuk meningkatkan jumlah dan keberagaman produk yang memiliki nilai tambah untuk mensejahterakan masyarakat dan menjamin perlindungan lingkungan dari pencemaran ekosistem laut yang dapat memberikan dampak negatif bagi. Selanjutnya, ekonomi biru merupakan model dari pembangunan ekonomi yang dapat menyatukan pembangunan laut dan darat, serta menekan pengoptimalan dalam memanfaatkan teknologi, perindustrian, tanah dan perairan lautan dalam rangka untuk meningkatkan secara menyeluruh taraf untuk pemanfaatan sumber daya laut yang dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia sendiri.
2. Model Strategi Blue Ekonomi yang diterapkan Joko Widodo. Kebijakan manajemen perikanan di Indonesia pada umumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, membagi wilayah perairan pengelolaan perikanan Indonesia menjadi 11 bagian yang ditercantum di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dalam Peraturan Menteri Nomor 18/PERMENKP/2014 (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2014). WPPNRI merupakan kebijakan manajemen perikanan yang mengatur terkait penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, research and development yang termasuk di dalamnya inland waters, archipelagic waters, territorial seas, additional zones, and Indonesia's exclusive economic zone (ZEE) (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2014). Konsep ini tidak mengeruk sumber daya alam yang dimiliki, namun sebaliknya menenggalkan praktik ekonomi lama yang hanya menghasilkan keuntungan jangka pendek. Praktek blue ekonomi menghasilkan dampak jangka Panjang dan mengurangi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh emisi gas karbon. Penerapan Blue Economy juga tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi yang optimal karena dengan pemanfaatan

teknologi yang optimal, itu bisa mengakselerasi pertumbuhan, memperbagus pemilahan product diversification, dan dapat memanfaatkan sampah sebagai bahan produksi untuk memproduksi bahan baru (Sari & Muslimah, 2020).

3. Relevansi konsep Blue Ekonomi dengan Sustainable development goal (SDGs). Upaya pemerintah Indonesia menjadikan ekonomi biru sebagai kekuatan prioritas dalam mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan. Upaya ini dilakukan secara sinergi dan pemerataan di tingkat nasional maupun provinsi. Tujuan dari Blue Economy untuk disosialisasikan kepada masyarakat pesisir pantai agar para masyarakat dapat berfikir secara kritis mengenai konsep ini untuk meminimalisir pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan dan nantinya bisa mengambil sumber daya alam laut tersebut lebih efisien dan seimbang. Prinsip dalam pengelolaan sumber daya alam pada konsep Blue Economy ini yakni meningkatkan efisiensi sumber daya, sistem siklus pada produksi, meminimalisir pembuangan limbah, kepedulian sosial, inovasi, adaptasi, serta tata pada pengelolaan sumber daya alam yang baik agar nantinya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang baik (Prayuda et al., 2019). Relevansi antara Blue Economy dengan SDGs setidaknya mencakup 4 poin. Pertama, Blue Economy as a way out alternative of climate change (SDGs 13). Kedua, Blue Economy mengeksplorasi SDA laut sekaligus mengkonservasi (SDGs 14). Ketiga, Blue Economy memberdayakan masyarakat dari segi pengetahuan (SDGs 4). Keempat, Blue Economy menciptakan lapangan pekerjaan melalui pembangunan regional (SDGs poin ke 1, 8, dan 9)
4. Budget Tagging. Melakukan penandaan anggaran biru. Dimana hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk program-program pemerintah daerah yang berhubungan dengan isu lingkungan serta berdampak pada perubahan iklim terutama pada wilayah pesisir dan laut.

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan Kota Sabang, maka diketahui permasalahan utama pembangunan Kota Sabang yakni rendahnya pertumbuhan ekonomi masyarakat serta iklim investasi, belum mendukung pemanfaatan sumberdaya dan pariwisata berkelanjutan. Permasalahan utama ini memicu permasalahan-permasalahan disektor lainnya, seperti permasalahan pada sektor Kelautan dan Perlindungan Sumberdaya Alam. Disamping permasalahan tersebut diatas, masalah lingkungan dapat juga diakibatkan oleh konsep perencanaan pembangunan yang tidak benar. Beberapa permasalahan lingkungan yang timbul akibat dari konsep perencanaan yang tidak benar, antara lain:

- 1) Orientasi pembangunan hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan prinsip keadilan sosial dan kelestarian lingkungan
- 2) Perencanaan pembangunan lebih mementingkan keuntungan sesaat tanpa memikirkan kepentingan generasi mendatang,
- 3) Kurangnya koordinasi antar sektor (ego sektoral lebih dominan)

4) Penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Kinerja pendapatan daerah diukur dengan indikator derajat kemandirian keuangan daerah (desentralisasi fiskal). Indikator ini dihitung dari rasio antara Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah. Dengan mengetahui kemandirian keuangan daerah ini akan diketahui seberapa besar local taxing power suatu daerah, serta seberapa besar kemampuan PAD dalam mendanai belanja daerah yang dianggarkan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Derajat desentralisasi fiskal Kota Sabang dalam kurun waktu tahun 2017- 2021 tergolong rendah, terlihat dari rata-rata proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah hanya sekitar 9,39%. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Kota Sabang terhadap dana transfer dari pemerintah pusat (rata-rata 65-74 persen) dan Pemerintah Aceh (rata-rata 10-11 persen) termasuk dalam kategori ketergantungan yang tinggi.

Dalam kaitannya dengan sistem desentralisasi, pelaksanaan otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan dan mengembangkan potensi sumber daya di wilayahnya. Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonominya secara efektif adalah:

1. Besarnya kemampuan keuangan daerah; Daerah memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola, dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.
2. Berkurangnya ketergantungan kepada bantuan pusat; Pendapatan Asli Daerah harus menjadi sumber pendanaan utama yang didukung oleh pendanaan dari perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Dalam konteks pengembangan ekonomi biru, penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dan pembangunan daerah akan berjalan secara optimal apabila didukung dengan kemampuan keuangan daerah yang mencukupi kebutuhan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, dalam rencana pembangunan daerah, analisis pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah sebagai upaya pendanaan atau dukungan terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan melalui pemahaman terhadap tingkat kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan pembangunan. Selain itu, perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan di masa lalu. Dari analisis kinerja beberapa tahun ke belakang dapat menjadi referensi melakukan proyeksi kinerja kondisi keuangan melalui berbagai macam metode analisa misalnya dengan melihat rata-rata pertumbuhan, menggunakan asumsi makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain), dan dapat juga dengan dasar kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah serta dapat melalui kebijakan di bidang keuangan daerah. Kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Sabang selama periode tahun 2017-2021 dapat dilihat atau diukur berdasarkan dari

perkembangan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) dalam periode dimaksud. Sesuai data yang tersedia, menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan dan realisasi belanja daerah. Penerimaan Pendapatan Asli daerah (PAD) sudah menunjukkan peningkatan yang baik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan ketentuan dan aturan serta perundang-undangan yang berlaku. Kinerja pengelolaan belanja pemerintah Kota Sabang periode 2017- 2021, dilihat dari realisasi dan target sudah menunjukkan kinerja yang semakin baik, begitu juga dari sisi penilaian laporan keuangan daerah menunjukkan kinerja yang cukup baik, terlihat dari hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun anggaran 2017 sampai 2020 memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Pembiayaan daerah selama ini difokuskan untuk menutupi defisit belanja Kota Sabang. Opini WTP maupun dengan penekanan suatu hal, dengan harapan, bisa menjadi penyemangat untuk selalu meningkatkan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik. Serta menjadi momentum baik untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas/kredibilitas dan transparansi keuangan daerah.

KESIMPULAN

Pemerintah berperan penting dalam melaksanakan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan, peran ini digambarkan dalam perencanaan anggaran yang matang dan memiliki outcome jelas dan terukur. Pemerintah juga dapat menggunakan anggaran sebagai alat untuk menentukan arah pembangunan daerah. Pemerintah daerah juga harus mendukung ketercapaian rencana aksi terhadap perubahan iklim yang mampu digambarkan dalam penganggaran serta mendukung tercapainya ekonomi biru. Untuk itu, dalam menentukan iklim investasi harus mendukung aspek ekonomi biru. Pemanfaatan sumberdaya alam yang mampu dikelola dengan baik dan ramah lingkungan, peningkatan pariwisata secara berkelanjutan dengan melihat aspek opportunity daerah serta peningkatan sumberdaya manusia yang handal.

REFERENSI

- Banu, N. M. (2020). Konsep blue economy terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. *Ekonis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 22(1).
- Creswell, Jhon. (2015). Riset Pendidikan: Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Riset Kualitatif & Kuantitatif. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Irawan, F. B. (2019). Menyingkap Kualitas Pelayanan Pada Toko Kelontong Aulia Anugerah Pati. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 26–35.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2018). Kelautan dan Perikanan dalam Angka Tahun 2018. Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pemerintah Kota Sabang. 2022. Laporan Blue Budget Tangging Kota Sabang: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Prayuda, R., Sary, D. V., & Riau, U. I. (2019). Strategi Indonesia Dalam Implementasi Konsep Blue Economy terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN a. *Indonesian Journal of International Relations*, 3(2), 46– 64.

Sari, D. A. A., & Muslimah, S. (2020). Blue economy policy for sustainable fisheries in Indonesia. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 423, Issue 1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/423/1/012051>.

Saputro, F., Irianto, B. S., & Herwiyanti, E. (2016). Faktor yang mempengaruhi ketepatan anggaran sektor publik. *SAR (Soedirman Accounting Review): Journal of Accounting and Business*, 1(2), 21-39.

Septiandika, V., & Lailatul Fitria, N.J. (2022). Pengaruh Pelatihan dan Kreativitas Usaha terhadap Pengembangan UMKM (Riset UMKM Sektor Ekonomi Biru di Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo). *Eksos*.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. PT Alfabet.

Sumenge, A. S. (2013). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).

Wahyuddin, Y.A., Hidayat, R.M., & Verdiansyah, T.R. (2022). Strategi Kebijakan Blue Economy Indonesia dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan pada Era Joko Widodo. *Sriwijaya Journal of International Relations*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.